



Network Governance pada Program Tagana Masuk Sekolah Dalam Menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Kolaka

Network Governance in the Tagana Entering Schools Program in Facing Natural Disasters in Kolaka Regency."

Sry Devi^{1*}, Laode Asrun Azis R¹, Isra Djabbar¹

¹ *Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November kolaka, Indonesia.*

*Author correspondence: srydevi2208@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted:

2025-05-12

Revised:

2025-05-20

Accepted:

2025-05-22

Published:

2025-05-23

Keywords: disaster mitigation; network governance, tagana program;

Kata kunci: mitigasi bencana; network governance; program tagana;

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and describe Network Governance in the Implementation of the Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Program Entering Schools in Facing Natural Disasters in Kolaka Regency. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The location of this research is at the Social Service, TAGANA Headquarters, and schools that have received counseling on this program. The informants in this study are TAGANA Coordination from the Social Service, TAGANA Coordinator, TAGANA Secretary, TAGANA Members, and School Teachers. The type and source of data in this research are primary data and secondary data. The research results show that the implementation of network governance in the TAGANA Program Entering Schools in Kolaka Regency involves several actors, including the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Education, Culture, Research and Technology, Social Service, TAGANA, and school parties including teachers and students as beneficiaries. However, coordination between the Social Service, TAGANA, and schools is not yet optimal, this is due to many schools rejecting the program on the grounds that the entire budget must be borne by the school, while the budget has actually been prepared by the social service. Lack of good communication causes miscommunication between actors. The factors that cause this program to be minimally implemented are as follows: first, region: not all schools can be reached due to geographical factors and different disaster paths, second, human resources: the number of TAGANA members is 52 people, but only 4-5 people can conduct socialization about disaster mitigation, third, budget: available funds must be divided with other programs such as disaster-prone village programs, TAGANA operations, public kitchens, and so on. Fourth, time: many tasks of TAGANA and other social services so that this program is neglected.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai Network Governance Pada Pelaksanaan Program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Masuk Sekolah Dalam Menghadapi Bencana Alam Di Kabupaten Kolaka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Dinas sosial, Mako TAGANA dan sekolah yang telah mendapatkan penyuluhan program ini. Informan dalam penelitian ini yakni, Koordinasi TAGANA Dari Dinas Sosial, Koordinator Tagana, Sekretaris Tagana, Anggota Tagana Dan Guru-Guru Sekolah. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan network governance dalam Program TAGANA Masuk Sekolah di Kabupaten Kolaka melibatkan beberapa aktor, diantaranya kementerian sosial RI, kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, dinas sosial, TAGANA dan pihak sekolah-termasuk guru serta siswa sebagai penerima manfaat. Namun, Koordinasi antara Dinas Sosial, TAGANA dan Sekolah belum optimal, hal ini disebabkan oleh banyaknya sekolah yang menolak program ini dengan alasan bahwa seluruh anggaran harus ditanggung oleh pihak sekolah, padahal anggaran sebenarnya telah disiapkan oleh dinas sosial. Kurangnya komunikasi yang baik menyebabkan miskomunikasi Antar aktor. adapun faktor-faktor yang menyebabkan program ini minim dilaksanakan adalah sebagai berikut: pertama wilayah: tidak semua sekolah dapat dijangkau karena faktor geografis dan juga jalur bencana yang berbeda-beda, kedua sumber daya manusia : jumlah anggota TAGANA sebanyak 52 orang tetapi hanya 4-5 orang yang bisa melakukan Sosialisasi tentang mitigasi bencana, ke tiga anggaran: dana yang tersedia harus dibagi dengan program lainnya seperti program kampung siaga bencana, Operasional TAGANA, dapur umum dan lain sebagainya. keempat waktu: banyak tugas TAGANA dan dinas sosial lainnya sehingga program ini terabaikan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.466 pulau dan luas wilayah total sekitar 5,18 juta km², yang sebagian besar terdiri atas wilayah perairan (Maulana & Andriansyah, 2024). Kondisi geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik Australia, Pasifik, dan Eurasia menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam mencakup peristiwa yang terjadi secara alami seperti gempa bumi dan banjir, sedangkan bencana non-alam dan sosial terkait dengan faktor teknologi, epidemi, maupun konflik antar kelompok masyarakat. Di antara kategori tersebut, bencana alam memiliki dampak luas yang mencakup kerusakan fisik, korban jiwa, hingga gangguan sosial dan ekonomi, termasuk sektor pendidikan.

Kabupaten Kolaka adalah salah satu wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana, terutama banjir dan gempa bumi. Banjir sering terjadi karena curah hujan tinggi, luapan sungai, dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan yang menyebabkan deforestasi (Saputra, 2023). Beberapa kecamatan di Kabupaten Kolaka yang terdampak banjir antara lain Watubangga, Wolo, Samaturu, Latambaga, dan lain-lain. Selain itu, gempa bumi yang tidak dapat diprediksi waktunya juga menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga, terutama anak-anak di sekolah. Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka telah menginisiasi program mitigasi bencana melalui sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan di lingkungan sekolah. Program ini dikenal sebagai *Taruna Siaga Bencana* (TAGANA) Masuk Sekolah, yang dikelola oleh Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012. TAGANA adalah relawan sosial yang terlatih untuk membantu penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Program TAGANA Masuk Sekolah merupakan upaya preventif yang fokus pada fungsi prabencana dengan tujuan membangun budaya kesiapsiagaan bencana di kalangan siswa. Program ini didukung oleh kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 33 Tahun 2019 dan surat edaran bersama antara Menteri Pendidikan dan Menteri Sosial. Namun, berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan program ini di Kabupaten Kolaka masih sangat terbatas. Baru 7 sekolah dari total 285 sekolah di seluruh kecamatan yang mendapat sosialisasi kesiapsiagaan bencana melalui TAGANA. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya kolaborasi dan jaringan antara pemerintah, organisasi TAGANA, dan sekolah dalam mendukung upaya mitigasi bencana.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi bencana sangat bergantung pada tata kelola jaringan (*network governance*) yang efektif. Ansell & Gash (2008) menekankan pentingnya kolaborasi antar aktor dalam tata kelola pemerintahan yang kompleks, khususnya dalam konteks kebijakan publik yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Selanjutnya, Comfort et al. (2010) mengungkapkan bahwa jaringan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan relawan meningkatkan efektivitas respons dan mitigasi bencana. Penelitian Nurhidayah et al. (2022) tentang mitigasi bencana berbasis komunitas di Jawa Tengah juga menggarisbawahi peran jaringan sosial dan kolaborasi antar stakeholder dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Meskipun demikian, kajian terkait penerapan *network governance* dalam konteks program edukasi mitigasi bencana di sekolah, khususnya di Kabupaten Kolaka, masih sangat terbatas. Penelitian ini hadir sebagai kebaruan dengan mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme tata kelola jaringan berjalan dalam pelaksanaan program TAGANA Masuk Sekolah, dengan fokus pada hubungan aktor, manajemen jaringan, fitur institusional serta interaksi dan kompleksitas pemangku kepentingan. Melihat pentingnya peran kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam keberhasilan program ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai Network Governance Pada

Pelaksanaan Program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Masuk Sekolah Dalam Menghadapi Bencana Alam Di Kabupaten Kolaka.

Kajian Literatur

Konsep Governace

Konsep *governance* lahir sebagai reaksi terhadap dominasi negara dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. *Governance* menggambarkan sebuah gabungan organisasi di mana aktor-aktor berinteraksi untuk menciptakan produk yang menekankan pada aspek koordinasi antar organisasi, kontribusi bersama, dan ketergantungan sumber daya. Hubungan timbal balik dalam *governance* dibangun atas dasar kepercayaan, yang termotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan sumber daya dari organisasi lain (Sabaruddin & Said, 2020). Rhodes dalam Sabaruddin & Said (2020) juga mengungkapkan bahwa dalam konsep *governance*, terdapat elemen *networks* atau jejaring, yang menjadi inti analitis dalam pengertian *governance* pada studi administrasi publik. Sistem pemerintahan yang lebih dulu terpusat kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan lokal yang melibatkan organisasi kompleks dari sektor publik, swasta, dan masyarakat. *Governance* adalah proses penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola urusan publik melalui mekanisme, proses, dan jejaring yang melibatkan aktor dari berbagai sektor. *Governance* menekankan koordinasi, ketergantungan sumber daya, dan hubungan berbasis kepercayaan untuk mencapai tujuan bersama dalam tata kelola yang inklusif dan efektif.

Network Governace

Menurut Klijn & Koppenjan (2012), konsep *governance network* merupakan hubungan interdependensi antara aktor-aktor yang memiliki otonomi di sektor publik, swasta, dan sosial, yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi jaringan. Struktur dalam jaringan kebijakan ini menggambarkan posisi dan interaksi antara aktor-aktor yang terlibat. Keberhasilan jaringan *governance* dilihat dari kemampuan aktor-aktor tersebut untuk beradaptasi dan menghasilkan strategi bersama dalam menghadapi masalah dan mencapai solusi win-win. *Network governance* adalah konsep tata kelola yang menggambarkan hubungan interdependensi antara aktor-aktor dari sektor publik, swasta, dan sosial yang memiliki otonomi, namun Keberhasilannya bergantung pada kemampuan para aktor untuk beradaptasi, menyusun strategi bersama, serta mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Teori network governance

Klijn & Koppenjan (2012) mengemukakan Pengamatan pertama yang dapat dibuat tentang perkembangan teori ini adalah adanya konvergensi antara tiga tradisi penelitian. Di masa lalu, hanya terdapat sedikit kutipan silang antara tradisi-tradisi tersebut, yang membentuk pilar-pilar disiplin yang terpisah Namun, variasi dalam metode penelitian dan penggunaan konsep yang berasal dari berbagai tradisi telah meningkat. Meskipun perdebatan tentang konsep dan sifat teori jaringan di antara para peneliti jaringan terus berlanjut, terdapat sekumpulan konsep dan asumsi umum yang dapat diidentifikasi. Teori jaringan

tata kelola yang berkembang ditandai dengan penggunaan konsep inti dan asumsi berikut:

1. *Actors, interdependency, and frames (aktor, interpendensi, dan kerangka pemikiran)*

Pada indikator ini Klijn dan Koppenjan menerangkan bahwa dalam membangun sebuah network governance, jaringan akan terdiri dari aktor yang beragam dan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang beragam. Aktor akan tetap menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing akan tetapi, pada suatu waktu apabila dibutuhkan dapat bekerja bersama dengan aktor lain dalam jaringan (Klijn & Koppenjan, 2012). Pertukaran sumber daya antar aktor yang terlibat dalam network governance sangat mungkin terjadi dalam upaya mewujudkan tujuan bersama. Pertukaran sumberdaya tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam implementasi kebijakan ataupun program yang kemudian akan menimbulkan hubungan interdependency antar aktor.

2. *Network management (manajemen jaringan)*

Manajemen jaringan dibutuhkan untuk mengelola sumber daya dalam jaringan agar menciptakan output yang maksimal. Manajemen jaringan bertujuan untuk memfasilitasi interaksi dan mengelola pertukaran sumber daya. Pengelolaan interaksi yang dimaksud adalah bagaimana jaringan memberikan ruang bagi pemangku kepentingan yang ada untuk berinteraksi dan bernegosiasi dalam upaya mewujudkan tujuan bersama.

3. *Institutional features (fitur institusional)*

Kompleksitas hubungan interaksi antar aktor akan memunculkan sebuah regulasi yang keberlangsungan dari mengatur network, berkaitan dengan cara aktor berperilaku, pertukaran sumber daya dan batasan dalam pelaksanaannya. Apabila sebuah network tidak memiliki regulasi dapat mengacu pada regulasi yang ada di atasnya seperti undang-undang atau regulasi lainnya. Hal ini dimaksudkan supaya dalam prosenya tidak akan keluar dari tujuan awal adanya network governance. sehingga tetap ada pada alur yang telah ditentukan.

4. *Interactions and complexity (interaksi dan kompleksitas)*

Hubungan saling ketergantungan antar aktor memilih konsekuensi interaksi yang kompleks dan pola negosiasi dalam pemecahan masalah. Konsep network governance menekankan pada implementasi suatu kebijakan bukan merupakan tindakan dari satu aktor Tunggal, melainkan tindakan dari banyak aktor. Interaksi yang kompleks nantinya akan menghasilkan sebuah output dapat berupa output berupa program atau kebijakan.

Beberapa penelitian memberikan wawasan terkait penerapan network governance, terutama dalam konteks mitigasi bencana dan pengelolaan program berbasis kolaborasi antar aktor. Seperti penelitian Ansell & Gash (2008) mengungkapkan pentingnya collaborative governance yang mengedepankan kolaborasi antar aktor pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam

penyelesaian masalah publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kebijakan publik sangat bergantung pada keberhasilan dalam menciptakan jaringan yang efisien antara berbagai aktor. Comfort et al. (2010) menganalisis bagaimana jaringan kerja sama antar berbagai aktor dalam manajemen bencana dapat meningkatkan respons dan mitigasi bencana. Penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan bencana yang efektif membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Nurhidayah et al. (2022) mengkaji implementasi mitigasi bencana berbasis komunitas di Jawa Tengah, dengan fokus pada pengelolaan jaringan sosial dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis jaringan sosial dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Konsep Tagana Masuk Sekolah

Tagana Masuk Sekolah merupakan salah satu program mitigasi bencana yang di rancang oleh kementerian sosial melalui organisasi Tagana. Program ini bertujuan untuk menurunkan risiko bencana melalui edukasi yang menyasar anak-anak usia sekolah dasar. Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana, menyatakan bahwa Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut TAGANA adalah relawan sosial yang sudah terlatih atau tenaga kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian aktif dalam penanggulangan bencana. Menurut Tanjung et al., (2023) Taruna Siaga Bencana (Tagana) merupakan bagian dari organisasi atau lembaga kerelawanan yang bergerak dibidang bencana alam dan sosial, yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial RI. Tagana lahir untuk memudahhi peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Taruna siaga bencana (TAGANA) sebagai lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang kerelawanan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial memiliki konsep atau perencanaan yang matang dalam mensosialisasikan informasi terkait kebencanaan.

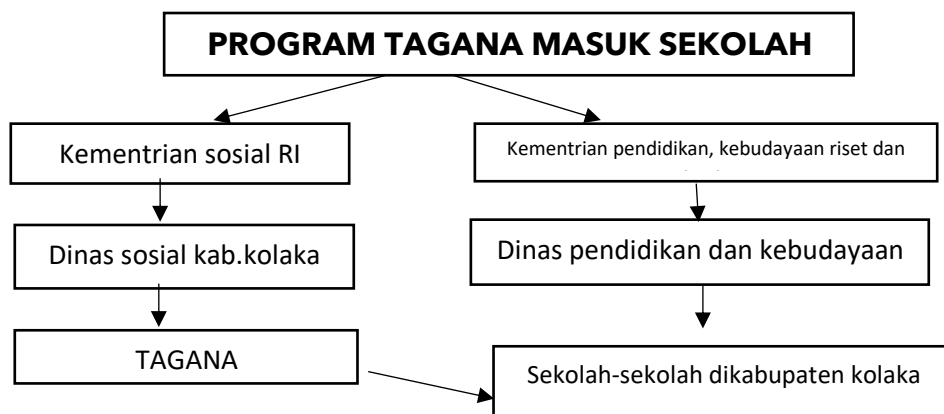
Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Sosial, Mako TAGANA, Sekolah-sekolah yang telah mendapatkan sosialisasi program TMS. Data primer dalam penelitian di peroleh melalui teknik wawancara dan observasi langsung dilapangan. Dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari internet, jurnal, buku, undang-undang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan Kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Actors, interdependency, and frames

Pada indikator ini menerangkan bahwa dalam membangun sebuah network governance, jaringan akan terdiri dari aktor yang beragam dan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang beragam. Aktor akan tetap menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing akan tetapi, pada suatu waktu apabila dibutuhkan dapat bekerja bersama dengan aktor lain dalam jaringan. (Klijn & Koppenjan, 2012). Berdasarkan hasil penelitian mengenai Actors, interdependency, and frames (aktor, Ketergantungan, dan kerangka pemikiran.) Program Taruna Siaga Bencana di kabupaten kolaka melibatkan berbagai actor, seperti kementerian social RI, kementerian Pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi, dinas social dan dinas Pendidikan kab. kolaka, Tagana, dan sekolah-guru dan siswa yang ada di kabupaten kolaka. Setiap actor memiliki peran masing-masing, dinas sosial berperan sebagai penyelenggara utama program taruna siaga bencana masuk sekolah di kabupaten kolaka. Program ini merupakan program dari kementerian sosial maka dari itu dinas sosial berperan untuk meneruskan kebijakan dan memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Kemudian TAGANA berperan sebagai mitra utama dinas sosial, program ini didesain khusus untuk TAGANA dalam rangka memberikan edukasi mitigasi bencana kepada siswa-siswa di kabupaten kolaka, Sementara itu Lembaga Pendidikan berperan sebagai tempat program taruna siaga bencana ini dijalankan.



Gambar 1. Skema Aktor Network

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

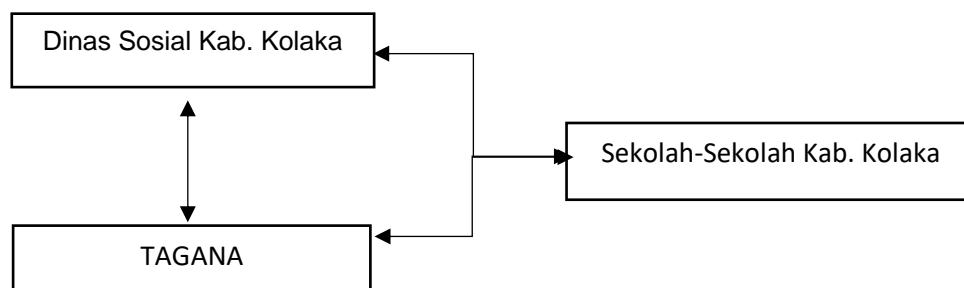
Mekanisme Interdependency dalam Network TAGANA, Dinas Social dan pihak sekolah saling berinteraksi tetapi interdependensi dalam pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan yaitu kurangnya jaringan komunikasi yang terjalin antar pemangku kepentingan, sehingga sinergitas dan kerja sama masih mengalami kendala. Tantangan tersebut berupa kurang partisipasi dari Lembaga Pendidikan karena masih ada kesalahpahaman tentang beban anggaran dan kesulitan dalam menyesuaikan jadwal pembelajaran, resistensi dari beberapa sekolah, yang masih menganggap bahwa program ini merupakan beban tambahan bagi mereka. Oleh karena itu pentingnya meningkatkan sinergi antara para pemangku kepentingan guna memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik. adanya Komunikasi yang baik antar dinas sosial, TAGANA, dan pihak sekolah akan membuat pelaksanaan program ini menjadi lebih baik

lagi sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman terhadap pihak sekolah terkait anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

Namun, pelaksanaan program ini juga tidak akan berjalan dengan baik tanpa SOP kerja dalam program ini meliputi tiga tahapan utama. Pertama, tahap persiapan yang mencakup observasi sekolah, mengkaji hasil observasi, pengurusan administrasi, serta penjadwalan kegiatan. Kedua, tahap pelaksanaan, di mana kami memberikan materi kesiapsiagaan, melakukan simulasi evakuasi, serta membentuk unit siaga bencana sekolah. Ketiga, tahap evaluasi dan pelaporan, di mana kami bersama fasilitator menilai efektivitas program, melihat apakah sekolah telah menerapkan langkah-langkah mitigasi yang diajarkan, serta menyusun laporan untuk dinas sosial. Maka Dari itu Peningkatan jaringan komunikasi dan koordinasi menjadi factor kunci dalam keberhasilan implementasi program Taruna siaga bencana masuk sekolah di kabupaten kolaka. Kemudian frames atau kerangka pikir aktor sudah memahami perannya melalui tugas dan wewenangnya dalam proses network governace pada Program Taruna Siaga Bencana Masuk Sekolah di kabupaten kolaka.

Network management

Manajemen jaringan dibutuhkan untuk mengelola sumber daya dalam jaringan agar menciptakan output yang maksimal. Manajemen jaringan bertujuan untuk memfasilitasi interaksi dan mengelola pertukaran sumber daya. Pengelolaan interaksi yang dimaksud adalah bagaimana jaringan memberikan ruang bagi pemangku kepentingan yang ada untuk berinteraksi dan bernegosiasi dalam upaya mewujudkan tujuan bersama. Manajemen jaringan dalam konteks Program TAGANA Masuk Sekolah di Kabupaten Kolaka bertujuan untuk memfasilitasi interaksi antar aktor yang terlibat, memastikan kelancaran implementasi program, serta menjaga keberlanjutan program itu sendiri. Network governance yang digunakan dalam Program Taruna Siaga Bencana Masuk Sekolah Di Kabupaten Kolaka adalah melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi yang dilakukan membantu para aktor untuk mengelolah interkasi, komunikasi dalam program ini.



Gambar 2. Skema Koordinasi Implementasi Program Taruna Siaga Bencana Masuk Kolaka Di Kabupaten Kolaka

Sumber : Diolah dari data penelitian, 2025

Dari skema koordinasi network di atas para aktor sudah melaksanakan koordinasi pada saat program ini akan diimplementasikan. Namun, masih ada beberapa masalah yang menghambat keberhasilan program ini. Rendahnya inisiatif sekolah untuk mengajukan agar program TMS tersebut dijalankan

sehingga Dinas Sosial harus lebih proaktif dalam mengajak sekolah untuk berpartisipasi agar program ini dapat berjalan, padahal secara regulasi, sekolah dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan penyuluhan. Setiap tahun, pertemuan koordinasi diadakan untuk mendiskusikan pelaksanaan program, namun belum semua pihak dapat terlibat secara maksimal.

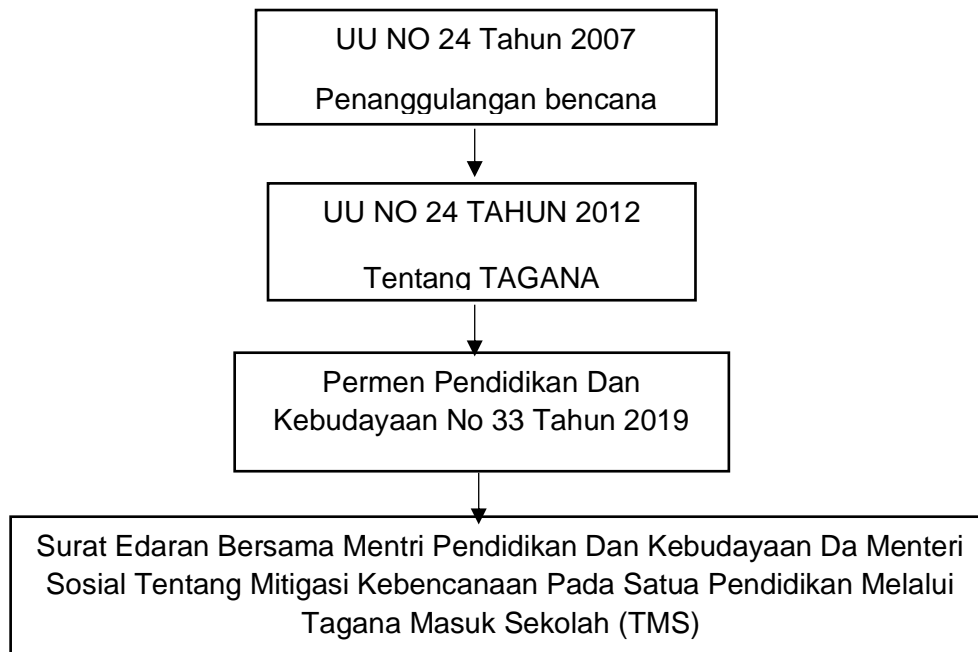
Kemudian dalam implementasinya, TAGANA menggunakan metode evaluasi berbasis infrastruktur untuk memantau efektivitas program. Salah satunya adalah pemasangan rambu-rambu bencana di sekolah yang telah mendapatkan penyuluhan. Keberadaan rambu ini menjadi indikator keberhasilan, karena jika rambu tetap terpasang dan digunakan, maka program dianggap berjalan dengan baik. Namun, jika rambu tersebut hilang atau tidak digunakan, ini menandakan bahwa efektivitas program masih perlu diperbaiki. Keberhasilan program juga sangat bergantung pada pembagian peran yang jelas di dalam tim TAGANA. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab masing-masing, mulai dari koordinator kegiatan, penyediaan perlengkapan, hingga pengawasan terhadap keberadaan dan pemeliharaan rambu evakuasi di sekolah-sekolah. Dengan pembagian peran yang jelas, diharapkan program ini dapat terlaksana dengan lebih terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan program, laporan kegiatan harus dibuat setelah pelaksanaan, termasuk pencatatan jumlah peserta, penyediaan sarapan, dan evaluasi terhadap keberhasilan program. Hal ini penting agar semua pihak yang terlibat dalam program ini tetap menjaga komitmen untuk melaksanakan kegiatan mitigasi bencana dengan baik.

Namun, meskipun sudah ada upaya koordinasi yang cukup baik antara Dinas Sosial, TAGANA, dan pihak sekolah, masih ada kendala yang dihadapi, terutama dalam hal kesadaran dan keterlibatan sekolah dalam program ini. Beberapa sekolah belum menunjukkan inisiatif untuk mengajukan permohonan, yang mengharuskan Dinas Sosial untuk mengambil langkah lebih aktif dalam mengajak mereka untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi dan sinergi antara semua pihak yang terlibat, agar program ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah.

Institutional features

Kompleksitas hubungan interaksi antar aktor akan memunculkan sebuah regulasi yang keberlangsungan dari mengatur network, berkaitan dengan cara aktor berperilaku, pertukaran sumber daya dan batasan dalam pelaksanaannya. Apabila sebuah network tidak memiliki regulasi dapat mengacu pada regulasi yang ada di atasnya seperti undang-undang atau regulasi lainnya. Hal ini dimaksudkan supaya dalam prosenya tidak akan keluar dari tujuan awal adanya network governance. sehingga tetap ada pada alur yang telah ditentukan. Dalam konteks Program TAGANA Masuk Sekolah, regulasi memiliki peran krusial untuk mengatur interaksi antar aktor yang terlibat, pertukaran sumber daya, serta batasan-batasan dalam pelaksanaannya. Program ini memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung implementasinya. Program ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan

Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2012 tentang peran TAGANA dalam penanggulangan bencana Serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Sosial tentang mitigasi kebencanaan pada satuan Pendidikan melalui program TAGANA masuk sekolah (TMS).



Gambar 3. Skema Kebijakan Program Taruna Siaga Bencana Masuk Sekolah
Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Regulasi ini menunjukkan bahwa Program TAGANA Masuk Sekolah bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah, terutama di kalangan anak-anak. Walaupun regulasi tersebut sudah mengatur mekanisme pelaksanaan program, pada kenyataannya terdapat tantangan di tingkat implementasi. Salah satunya adalah lemahnya penerapan manajemen kebencanaan di tingkat sekolah. Sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setiap sekolah harus memiliki sistem manajemen kebencanaan atau disaster management, namun pada praktiknya, banyak sekolah yang belum menerapkannya dengan baik. Lebih lanjut, meskipun regulasi yang ada telah mengarahkan untuk menciptakan sekolah yang aman bencana, program ini tidak selalu bertahan lama di tingkat sekolah karena rendahnya pemahaman dan kesadaran sekolah akan tanggung jawab mereka terhadap program ini. Sebagai hasilnya, meskipun ada regulasi yang mendukung, kesadaran untuk mengimplementasikan dan menjalankan kebijakan tersebut di tingkat sekolah masih kurang.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya strategis, seperti meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana di sekolah, memasukkan program ini dalam kebijakan sekolah, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan dengan baik. Selain itu, kolaborasi

yang lebih erat antara Dinas Sosial, TAGANA, dan pihak sekolah juga harus diperkuat agar pemanfaatan regulasi yang sudah ada dapat dimaksimalkan dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana di sekolah. Evaluasi yang dilakukan secara rutin akan membantu memastikan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya sebatas dokumen, tetapi benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Interactions And Complexity

Hubungan saling ketergantungan antar aktor memilik konsekuensi interaksi yang kompleks dan pola negosiasi dalam pemecahan masalah. Konsep network governance menekankan pada implementasi suatu kebijakan bukan merupakan tindakan dari satu aktor Tunggal, melainkan tindakan dari banyak aktor. Interaksi yang kompleks nantinya akan menghasilkan sebuah output dapat berupa output berupa program atau kebijakan. Dalam konteks implementasi Program TAGANA Masuk Sekolah di Kabupaten Kolaka, interaksi antar aktor menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Konsep network governance menekankan bahwa kebijakan atau program tidak dapat diimplementasikan oleh satu aktor saja, tetapi memerlukan kerja sama dan koordinasi antara banyak aktor. Interaksi ini akan menghasilkan output yang tidak hanya berupa program, tetapi juga kebijakan yang didorong oleh hubungan saling ketergantungan antar aktor.

Dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi beberapa kendala dan tantangan yang berkaitan dengan berbagai aspek. beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah waktu pelaksanaan yang terbatas, aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau, terbatasnya sumber daya manusia (SDM), serta keterbatasan anggaran. Salah satu kendala utama yang diungkapkan adalah manajemen waktu, di mana penyuluhan sering kali terbatas hanya dalam lima jam, yang membuat materi dan simulasi harus disampaikan secara terburu-buru. Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah kurangnya perhatian dari beberapa sekolah terhadap pentingnya program ini, sehingga dampaknya tidak optimal. Selain tantangan tersebut, beberapa sekolah yang telah menjalankan program ini menunjukkan hasil yang positif. Guru-guru di sekolah yang telah melaksanakan program ini mengakui manfaat besar dari penyuluhan yang dilakukan, terutama dalam meningkatkan kesiapsiagaan siswa terhadap bencana. Beberapa sekolah bahkan menjaga dan merawat rambu-rambu evakuasi yang dipasang setelah pelaksanaan program, yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah tersebut serius dalam menerapkan hasil dari penyuluhan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa, meskipun ada hambatan dalam implementasi, program ini tetap memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas program ini, diperlukan beberapa perbaikan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah staf yang terlibat dalam penyuluhan, sehingga waktu yang terbatas dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Selain itu, pengoptimalan waktu pelaksanaan, serta peningkatan metode komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial, TAGANA, dan pihak sekolah perlu diperhatikan. Hal ini bertujuan agar lebih banyak sekolah dapat menerima manfaat dari program ini dan secara aktif mendukung

implementasinya. Dengan memperbaiki elemen-elemen tersebut, diharapkan Program TAGANA Masuk Sekolah dapat berjalan lebih baik dan berkontribusi lebih besar dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kolaka.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan bahwa Program TAGANA Masuk Sekolah di Kabupaten Kolaka merupakan upaya penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek network governance. Kurangnya sinergitas antara Dinas Sosial, TAGANA, dan pihak sekolah menjadi kendala utama dalam program ini, terutama dalam komunikasi dan persepsi terhadap tanggung jawab pelaksanaan program. Manajemen jaringan yang melibatkan berbagai aktor telah berjalan, aktor-aktor yang terlibat dalam program ini yaitu: kementerian social RI, kementerian Pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi, dinas social dan dinas Pendidikan kab. kolaka, Tagana, dan sekolah-guru dan siswa yang ada di kabupaten kolaka. Dari sisi regulasi, Program TAGANA Masuk Sekolah memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijalankan. Program ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2012 tentang peran TAGANA dalam penanggulangan bencana Serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Sosial tentang mitigasi kebencanaan pada satuan Pendidikan melalui program TAGANA masuk sekolah (TMS). implementasinya di sekolah masih terbatas akibat kurangnya pemahaman dan keterlibatan aktif pihak sekolah. Interaksi antar aktor juga mengalami hambatan akibat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta aksesibilitas wilayah, yang berdampak pada efektivitas program. Meskipun demikian, program ini tetap memberikan manfaat bagi sekolah yang telah menerapkannya, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana di kalangan siswa dan guru. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan keterlibatan sekolah, serta memastikan keberlanjutan program agar dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas.

Persantunan

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, anggota TAGANA, serta pihak sekolah yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. Tulisan ini merupakan versi pengembangan dari skripsi penulis yang berjudul "Network Governance pada Program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Masuk Sekolah dalam Menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Kolaka" yang disusun di Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka.

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Comfort, L. K., Boin, A., & Demchak, C. C. (2010). *Designing Resilience: Preparing for Extreme Events*. University of Pittsburgh Press.
- Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. (2012). Governance network theory: past, present and future. *Policy & Politics*, 40(4), 587-606. <https://doi.org/10.1332/030557312X655431>
- Nurhidayah, R., Herry, W., & Purwadinata, S. (2022). *Membangun Komunitas Dalam Pengembangan Masyarakat* (Samarinda). PT. Gaptak Media Pustaka.
- Sabaruddin, A., & Said, A. L. (2020). *Colaborative Governance: Pendekatan Pelayanan Publik*. CV. Pena Persada.
- Saputra, L. O. M. D. (2023). *Banjir melanda 13 desa dan kelurahan di Kolaka*. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/3619596/banjir-melanda-13-desa-dan-kelurahan-di-kolaka>
- Tanjung, R. S., Sikumbang, A. T., & Winda Kustiawan. (2023). Strategi Komunikasi Taruna Siaga Bencana Dalam Mensosialisasikan Urgensi Mitigasi Bencana di Kota Medan. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 8(2), 58-67. <https://doi.org/10.31289/symbolika.v8i2.7163>
- Taufan Maulana, A., & Andriansyah, A. (2024). Mitigasi Bencana di Indonesia. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(10), 3996-4012. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1213>